



Jadi Pembelajaran

Catatan kecil

SEJUMLAH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sambas dipanggil Polda Kalbar untuk menjalani

pemeriksaan terkait kasus dana hibah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2018 sebesar Rp80 Miliar. Hibah ini ditengarai tak sesuai peruntukan.

Salah satu buktinya, adalah Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor: B/1983/XII/RES.3.5./2019/Ditreskrimsus-3 tertanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan pada Ketua DPRD Kabupaten Sambas. Surat itu dikirim dalam rangka meminta bantuan menghadirkan anggota DPRD Sambas.

Menariknya, dalam dokumen Resume Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2018, ditemukan dua pokok temuan ketidakpatuhan. Walau sebenarnya, laporan tahun 2018 itu mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Para pimpinan DPRD Kabupaten Sambas menyatakan, pemanggilan itu, bukanlah sesuatu yang mesti ditanggapi berlebihan, pasalnya hal tersebut merupakan bentuk koordinasi lembaga.

Pemanggilan, diketahui dalam rangka untuk memberi keterangan, bukan pemeriksaan. Demi memenuhi kebutuhan akan informasi mengenai hibah Kabupaten Sambas tahun 2018, DPRD mesti kooperatif membantu proses tersebut.

Kasus ini mesti menjadi pembelajaran, agar kedepannya pengalokasian kegiatan tersebut lebih memperhatikan aspek administrasi. (*)

